

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**Judul Tesis : PENGGUNAAN KONSINYASI UNTUK
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI SUMATERA BARAT**

Nama : POPPY YULIANTI

NIM : 1620112068

Program : ILMU HUKUM

Studi

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan
LULUS pada tanggal 27 Juli 2018.



Prof. Dr. YULIANDRI, SH. MH.
NIP. 196207181988111001

Dr. KURNIA WARMAN, SH. MHum
NIP. 197106301998021002

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Prof. Dr. ZAINUL DAULAY, SH. MH
NIP. 195911221986031002

**Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. YULIANDRI, SH. MH
NIP. 196207181988111001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

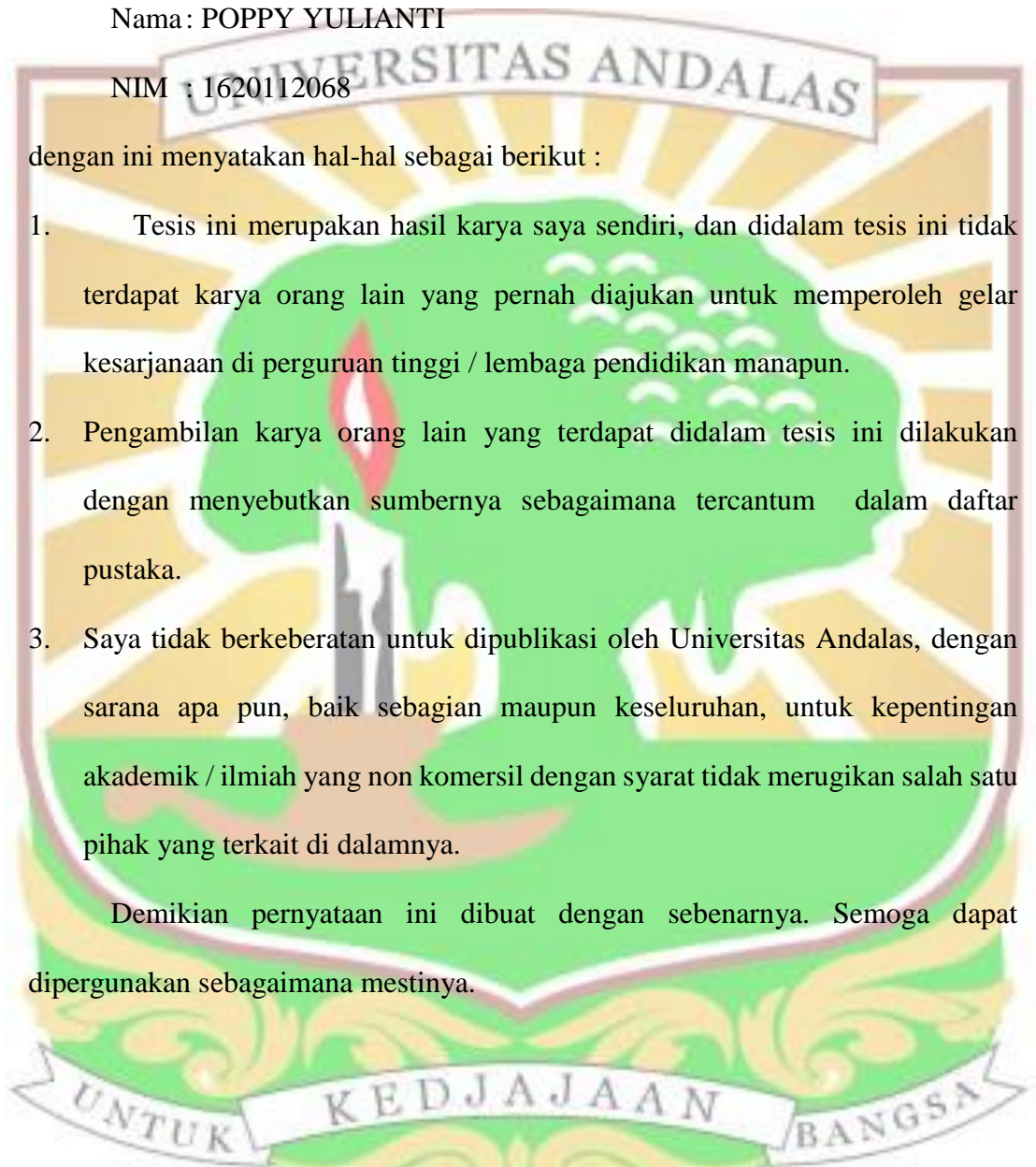
Nama : POPPY YULIANTI

NIM : 1620112068

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun.
2. Pengambilan karya orang lain yang terdapat didalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
3. Saya tidak berkeberatan untuk dipublikasi oleh Universitas Andalas, dengan sarana apa pun, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersil dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak yang terkait di dalamnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Padang, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan




POPPY YULIANTI

NIM. 1620112068

**THE USE OF CONSIGNMENT FOR THE COMPLETION OF
COMPENSATION IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST
IN WEST SUMATERA**

*POPPY YULIANTI, 1620112068, Law Magister Program,
Faculty of Law, University of Andalas, Padang*

ABSTRACT

Land acquisition for the public interest and the determination of compensation can not be separated from the issue of the disposal of rights for land, building and related objects therein. In disposal of rights for land, there are frequent problems related to the determination of compensation. To determine the losses can be conducted in several ways in order to be agreed by the parties, one of which is the compensation care in the district court (consignment). The problem to be studied is how the consignment is used in the case of the party entitled to reject the form and/or amount of compensation based on the result of the deliberation, the party entitled to receive the compensation is not known of its existence and the use of consignment in the case of land acquisition object to be compensated is being the object of the case in court/still disputed its ownership/seized by the authorized official/being a guarantee in the bank? The approach method used in this thesis study is empirical juridical study method and the study specification used is descriptive analytical study. The study data are collected using primary data and and secondary data collection method. The result of the study concludes that the consignment can be used in the case of the party entitled to refuse the form and/or the amount of compensation based on the result of the deliberation in terms of disagreement to the compensation generated based on the deliberation, there are parties who disagree but not appeal to the court, and some later submit objection to the court but ultimately refuse the compensation for the damages which have been determined by the court's decision which have obtained permanent legal force. The consignment can also be used in the case of the party entitled to receive compensation is not known its existence, the land acquisition officer notifies about the absence of the rightful party in writing to the heads of district and subdistrict/head of village or other name, but it is also necessary to be notified in the local, national, as well as with other media. The use of consignment in the case of land acquisition object to be compensated is being the object of the case in court/is still disputed its ownership/seized by the authorized official/being a guarantee in the bank is essentially not a problem in practice, but there will be problems in which the land procurement object is still in a family dispute and will lead to misinterpretation in the litigation, as it did with the normalization work of Batang Maransi- Batang luruih.

Key Words: Consignment, Compensation, Land Acquisition and Public Interest

**PENGUNAAN KONSINYASI UNTUK PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM DI SUMATERA BARAT**

*POPPY YULIANTI, 1620112068, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang*

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penetapan ganti kerugiannya tidak lepas dari masalah pelepasan hak atas tanah, bangunan serta benda-benda yang terkait didalamnya. Dalam melakukan pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah terutama berkaitan dengan penetapan ganti rugi. Untuk menetapkan ganti kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara supaya dapat disepakati oleh para pihak, salah satunya adalah penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri (konsinyasi). Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan /atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah, hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya dan penggunaan konsinyasi dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan/ masih dipersengketakan kepemilikannya / diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang / menjadi jaminan di bank? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode penelitian *juridic empiris* dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara *deskriptif analitis*. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer, dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan /atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dalam hal ketidaksetujuan terhadap ganti kerugian yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, ada pihak yang tidak setuju tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan, dan ada juga yang kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan tetapi pada akhirnya tetap menolak ganti kerugian yang telah ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penggunaan konsinyasi dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan lurah/kepala desa atau nama lainnya, selain itu diperlukan juga untuk diberitahukan melalui surat kabar baik daerah, nasional maupun dengan media lainnya. Penggunaan konsinyasi dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian sedang menjadi objek perkara di pengadilan / masih dipersengketakan kepemilikannya / diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang / menjadi jaminan di bank pada intinya tidak menjadi permasalahan dalam praktiknya, akan tetapi akan muncul permasalahan dimana objek pengadaan tanah tersebut masih dalam sengketa keluarga dan akan menyebabkan kesalahan interpretasi di proses pengadilan, seperti yang terjadi pada pekerjaan normalisasi Batang Maransi-Batang luruih.

Kata Kunci: Konsinyasi, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum